



KR-Antara/Andreas Fitri Atmoko

**PAMERAN NANDUR SRAWUNG#7: Pengunjung mencoba karya interaktif yang dipamerkan pada pameran seni rupa Nandur Srawung #7 bertajuk 'Wiwitan:Restart' di Taman Budaya Yogyakarta (TBY), Yogyakarta, Rabu (21/10). Pameran yang digelar dengan protokol Covid-19 itu menampilkan sedikitnya 200 karya dari 73 seniman.**

## TERMIN II DIBAYARKAN AWAL NOVEMBER

# 150.000 Pekerja Belum Terima BSU

**JAKARTA (KR)** - Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji yang termasuk dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), untuk Termin I Tahap I sampai V telah mencapai 98,09 persen atau sebanyak 12.166.471 pekerja penerima. Sementara sebanyak 150.000 pekerja tercatat belum menerima BSU karena kekurangan atau ketidaksesuaian data.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam keterangan di Jakarta, Rabu (21/10) mengungkapkan, berdasarkan data Kemaker per 19 Oktober 2020, BSU Termin I untuk Tahap I telah tersalurkan kepada 2.485.687 penerima (99,43 persen), Tahap II 2.981.531 penerima (99,38 persen), dan Tahap III 3.476.120 penerima (99,32 persen). Sementara untuk Tahap IV telah tersalurkan kepada

2.620.665 penerima (94,09 persen) dan Tahap V sebanyak 602.468 penerima (97,39 persen).

Subsidi gaji/upah, ungkap Ida, disalurkan melalui dua termin pembayaran. Setelah pembayaran Termin I selesai disalurkan, Kemaker akan kembali memproses pembayaran Termin II.

"Kami targetkan pembayaran Termin II dapat disalurkan pada awal bulan November 2020 setelah

proses evaluasi penyaluran subsidi gaji/upah Termin I ini selesai," ujarnya

Disampaikan Menaker, dengan anggaran mencapai Rp 37,7 triliun, program bantuan Pemerintah berupa subsidi gaji/upah ditargetkan bagi 15,7 juta pekerja yang terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) per 30 Juni 2020. Namun, hingga batas akhir penyerahan data penerima, data yang dikumpulkan dan diserahkan BPJS Ketenagakerjaan hanya mencapai 12,4 juta pekerja/buruh.

"Sisa anggaran akan diserahkan kembali ke Bendahara Negara. Rencananya, akan disalurkan untuk subsidi gaji/upah bagi guru honorer dan tenaga pendidik, baik di

lingkup Kemendikbud maupun Kemenag," ujarnya.

Ditambahkan Menaker, pekerja/buruh yang belum menerima BSU bisa dikarenakan kesalahan atau ketidakvalidan data, seperti nomor rekening dan NIK. "Sampai saat ini yang belum mendapatkan (BSU) sekitar 150.000-an pekerja karena ada kekurangan atau ketidaksesuaian data. Misalnya rekeningnya tidak valid, kemudian Nomor Induk Kependudukan (NIK)-nya kurang nomornya, atau nomor rekeningnya tidak sesuai dengan nama yang diserahkan," ujarnya.

"Selanjutnya Kemaker mengembalikan data ke BPJS Ketenagakerjaan untuk diberitahukan kepada pemberi kerja guna memperbaiki data pekerjanya," jelasnya. (Sim)-d

## BELANJA DENGAN UPAL DI PASAR Wanita Paruh Baya, Ditangkap

**KULONPROGO (KR)** - Seorang wanita paruh baya berinisial Sgy (58), warga Seren Gebang Purworejo, terancam hukuman 15 tahun penjara karena diduga mengedarkan uang palsu (upal) di Pasar Bendungan Wates. Waka Polres Kulonprogo, Kompol Sudarmawan, Rabu (21/10) mengungkapkan, kasus ini terjadi Minggu pekan lalu. Kronologinya, bermula saat pelaku datang ke Pasar Bendungan untuk membeli udang sebanyak 0,5 kg dengan harga Rp 20.000 di kios milik ibu Sp. Pelaku membayar dengan upal pecahan 100.000 dan mendapat kembalian uang pecahan asli Rp 80.000.

Pelaku kemudian belanja mi kering sebanyak 3 bungkus plastik dan 2 sachet penyedap rasa seharga Rp 10.000 di kios ibu St. Pelaku membayar dengan upal pecahan 100.000. Korban merasa curiga, uang yang diberikan pelaku adalah palsu. Kemudian ia melapor ke Satpam Pasar diteruskan menghubungi petugas Polsek Wates. Selanjutnya, dilakukan penangkapan dan penyelidikan.

Dari tangan pelaku diamankan dompet, tas rajut, 9 lembar upal pecahan 100.000 dengan nomor seri berbeda, satu lembar uang asli pecahan Rp 50.000, dua lembar uang asli pecahan Rp 5.000, tiga lembar uang asli pecahan Rp 2.000, satu lembar uang asli pecahan Rp 1.000, uang koin pecahan Rp 1.000 dan Rp 500, tiga bungkus mi kering dan dua sachet penyedap rasa. (M-4)-f

## KASUS JAKSA PINANGKI JPU Minta Sidang Dilanjutkan

**JAKARTA (KR)** - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung (Kejagung) meminta Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta untuk melanjutkan pemeriksaan dalam persidangan jaksa Pinangki Sirna Malasari. Hal itu disampaikan saat membacakan tanggapan atas nota keberatan (eksepsi) yang disampaikan penasihat hukum Pinangki.

"Kami penuntut umum meminta agar majelis hakim untuk menolak eksepsi terdakwa Pinangki Sirna Malasari dan menyatakan surat dakwaan yang telah kami bacaan memenuhi syarat serta melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa Pinangki Sirna Malasari," kata JPU Kejagung KMS Roni di Pengadilan Tipikor, Rabu (21/10).

Sebelumnya, pada sidang 30 September lalu, penasihat hukum Pinangki menyampaikan nota keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan jaksa. Isi eksepsi tersebut adalah agar majelis hakim menolak surat dakwaan jaksa.

Dalam perkara ini Pinangki didakwa dengan tiga dakwaan, yaitu pertama dakwaan penerimaan suap sebesar 500.000 dolar AS (sekitar Rp 7,4 miliar) dari terpidana kasus cecis Bank Bali Joko Soegiarto Tjandra. Kedua, dakwaan pencucian uang yang berasal dari penerimaan suap sebesar 444.900 dolar atau sekitar Rp 6.219.380.900,00 sebagai uang pemberian Joko Tjandra untuk pengurusan fatwa ke MA. Ketiga, Pinangki didakwa melakukan pemufakatan jahat bersama Andi Irfan Jaya dan Joko Tjandra untuk menyuap pejabat di Kejagung dan MA senilai 10 juta dolar AS. (Ful)-f

## MAJU CAWABUP DARI PARTAI LAIN Harjanta Dipecat dari PDIP

**KLATEN (KR)** - Wakil Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Perjuangan Kabupaten Klaten Drs Harjanta SE MPd yang juga Calon Wakil Bupati Klaten dari pasangan nomor urut 3, dipecat dari keanggotaan PDIP.

Ketua BP Pemilu PDIP Klaten Agus Wibowo dan Wakil Sekretaris Bidang program, Arif Nugroho dalam konferensi pers Rabu (21/10) sore mengemukakan, pemecatan tersebut dilakukan langsung oleh DPP PDIP, dalam surat tertanggal 20 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hastu Kristiyanto. Tindakan Harjanta yang mencalonkan diri sebagai wakil bupati dari partai lain dinilai sebagai pembangkangan terhadap ketentuan, keputusan dan garis kebijakan PDIP.

Saat dikonfirmasi terkait pemecatan tersebut, Harjanta hanya memberikan jawaban singkat bahwa apa yang ia lakukan adalah salah satu upaya untuk memajukan Kabupaten Klaten. Selanjutnya ia mengatakan bahwa akan segera memberikan siaran pers.

Dalam surat keputusan DPP PDIP nomor 71/KPTS/DPP/X/2020 tentang pemecatan Harjanta dari keanggotaan PDIP tersebut mencantumkan adanya beberapa pertimbangan. Harjanta juga dinilai tidak mengindahkan instruksi DPP PDIP terkait rekomendasi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Klaten pada Pilkada serentak tahun 2020. Harjanta justru mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Bupati Klaten dari partai politik lain. (Sit)-d

## BERLARI SAMBIL BERWISATA Bisa Jadi Daya Tarik Lawan Covid-19

**YOGYA (KR)** - Olahraga lari termasuk yang kian digandrungi saat ini, khususnya setelah terjadi wabah Covid-19. Selain semakin sehat dan menambah daya imun, olahraga lari juga dapat menurunkan tingkat stres, apalagi berlari melewati rute daerah wisata.

"Saat ini memang banyak bermunculan kembali para pelari. Mereka yang selama ini tidak beraktivitas karena pandemi, kembali berlari. Selain itu, juga muncul masyarakat yang kian gemar lari untuk meningkatkan daya tahan tubuh," ujar Ketua Harian Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) DIY, Bambang Dewanjaya dalam Bincang Editorial KR, Rabu (21/10) bersama pe-



KR-Istimewa  
**Bambang Dewanjaya**

warta Primaswolo Sudjono. Bincang ini juga ditayangkan di Channel YouTube Kedaulatan Rakyat TV.

Menurut Bambang, banyaknya warga yang suka berlari ini diharapkan bisa menjadi kebiasaan baru. Di samping untuk menghindari serangan penyakit karena daya tahan meningkat, juga dapat meramaikan olahraga lari. Untuk saat ini, lari tidak

hanya untuk mengejar prestasi semata, dengan melihat catatan waktu yang dihasilkan, tetapi juga menjadi sarana rekreasi.

"Di Yogya sendiri, banyak lokasi yang dapat dijadikan sarana rekreasi sambil berolahraga lari. Bahkan saat sebelum pandemi, tempat-tempat wisata tersebut dilewati rute lomba lari," ujar Bambang yang mantan pelari SEA Games.

Beberapa lokasi wisata, baik desa wisata, atau destinasi lain dapat menjadi tempat favorit untuk berolahraga lari sambil berwisata. Karena itu, jika dikembangkan lagi, maka akan menjadi magnet menarik. "Selain berolahraga, bisa menghidupkan pariwisata Yogyakarta," ujar Bambang. (Jon)-d

## Resesi ..... Sambungan hal 1

Tentu tidak terlepas dari strategi memacu geliat ekonomi bisnis UMKM pada khususnya dan pelaku ekonomi bisnis umumnya. Komitmen terhadap ragam upaya itu termasuk salah satunya melakukan restrukturisasi kredit dan pembiayaan UMKM.

Jika dicermati sebenarnya problem resesi dan kebangkitan ekonomi pasca-pandemi saat ini menjadi sinkron dengan realitas yang ada. Karena di satu sisi ancaman resesi menjadi nyata sementara di sisi lain komitmen untuk kebangkitan ekonomi selaras dengan target percepatan pemulihan ekonomi nasional. Padahal, pendanaan yang digelontorkan oleh pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional tidaklah kecil.

Ironisnya, semua target yang ditetapkan belum tercapai karena faktanya pandemi justru terus berlanjut.

Realitas ini diperparah dengan komitmen pemerintah yang terus memaksakan pilkada serentak di 270 daerah pada 9 Desember, meski telah ada sejumlah desakan untuk menunda pelaksanaan pilkada.

Berkaca dari ancaman resesi dengan komitmen kebangkitan ekonomi maka potret yang terjadi di Jawa Tengah menarik dicermati. Data per 16 September 2020 ternyata jumlah restrukturisasi kredit di Jawa Tengah mencapai Rp 60,2 triliun dengan jumlah debitur yang mendapat restrukturisasi sebanyak 1,23 juta rekening. Jumlah ini berarti 6,84% dari akumulasi outstanding kredit secara nasional dan 16,67% rekening jika dibandingkan secara nasional. Kebijakan tersebut mayoritas dinikmati UMKM yaitu Rp 50,111 triliun atau 83,3% dari kumulatif restrukturisasi di Jawa Tengah.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan, di masa pandemi maka penyaluran kredit semestinya bisa terakumulasi untuk kepentingan produktif, bukan konsumtif. Sehingga perlu adanya koordinasi untuk memastikan semua penyalurannya tepat sasaran. Realita ini memberikan gambaran bahwa penyaluran KUR misalnya harus mampu memberikan kepastian terhadap proses produksi di semua level proses produksi, terutama UMKM.

Perekonomian Jawa Tengah di triwulan I masih cukup baik karena pertumbuhan masih tercatat 2,61% tetapi di triwulan II 2020 menjadi minus 5,94%. Selain itu, hasil Survei Konsumsi BI yaitu Indeks Kondisi Ekonomi pada triwulan II ada di level pesimis 68,6 atau jauh dibesarkan triwulan I yang sebesar 122,27. Fakta ini diperkuat dengan

realitas penyerapan lapangan kerja sebagai indeks yang terdalam. Hal ini tentu tidak bisa lepas dari kondisi WFH dan pembatasan kerja, termasuk juga PHK dan penerapan shift kerja di berbagai dunia industri pada masa pandemi.

Karenanya beralasan jika kemudian imbasnya adalah PDB di Jawa Tengah yaitu 61,7% sementara kontribusi ekspor 33,3% dan impornya minus 33,8%. Fakta lain yang juga menarik dicermati ternyata penurunan terbesar di sektor transportasi (-2,21%) karena faktor mobilitas individu dan distribusi barang - jasa menurun drastis, sektor pedagang besar - eceran (-1,7%), dan juga sektor pertanian (-0,3%). Kondisi ini tentu harus dicermati terutama antisipasi resesi ekonomi. (Penulis adalah Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo)-d

## DIY Bakal ..... Sambungan hal 1

dan pendidikan, serta penduduk yang tinggal di tempat berisiko seperti kawasan padat penduduk. (C) Kontak erat Covid-19, yaitu orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi Covid-19.

## Libur ..... Sambungan hal 1

secara disiplin untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19," tandas Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Rabu (21/10). Sultan mengungkapkan, meskipun DIY punya Jogja Pass yang bisa mendata para pengunjung atau wisatawan secara online, namun tanpa adanya kesadaran masyarakat untuk taat proses maka penularan virus bisa saja terjadi. Karena aplikasi itu pada akhirnya hanya berfungsi untuk melakukan tracing jika ditemukan kasus positif.

Sekda DIY Kadamanta Baskara Aji menyampaikan DIY libur panjang dan cuti bersama berlangsung 28 Oktober hingga 2 November 2020. Untuk itu, Pemda DIY melakukan antisipasi di destinasi wisata maupun dukungan penyelenggaraan wisata seperti rumah makan dan sebagainya.

"Yang harus dilakukan tetap menjaga protokol kesehatan pencegahan Covid-19 baik di destinasi wisata maupun tempat-tempat yang

(D). Administrator pemerintahan dalam bidang pelayanan publik.

Dengan perkembangan tersebut, Achmad Yurianto meminta jajaran dinas terkait untuk melakukan persiapan dengan sebaik-baiknya. (Jon)-f

dituju wisatawan," kata Baskara Aji. Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengimbau agar masyarakat tidak melakukan perjalanan, ke tempat kerumunan, atau pulang kampung saat periode libur panjang pekan depan guna menekan kasus penyebaran Covid-19.

Namun jika mendesak harus keluar rumah, Wiku mengingatkan agar masyarakat menegakkan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan memakai sabun di air mengalir.

Wiku mengungkapkan, data yang dikaji berdasarkan persentase angka periode liburan Hari Raya Idul Fitri 22-25 Mei 2020 terjadi kenaikan jumlah kasus harian dan kumulatif mingguan sekitar 69-93 persen sejak hari libur Lebaran dengan rentang waktu 10-14 hari, kemudian melihat dampaknya. (Ria/Ira/San)-d